



**LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK  
PANITIA KERJA PENERIMAAN KOMISI XI DPR RI KE PROVINSI JAWA TIMUR  
PERTEMUAN DENGAN JAJARAN KPPBC TMP TANJUNG PERAK  
2 - 4 JUNI 2016**

---

## **I. PENDAHULUAN**

Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016, Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 sampai dengan 4 Juni 2016. Sesuai dengan ruang lingkup tugasnya di bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional dan perbankan, Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah serta instansi-instansi Pemerintah Pusat dan mitra kerja Komisi XI DPR RI yang ada di daerah.

Komisi XI DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank, yang bermitra kerja dengan Kementerian Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretariat Jenderal BPK RI, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Perbankan serta Lembaga Keuangan Bukan Bank. Komisi XI DPR RI juga menangani kinerja keuangan BUMN, PMN, dan privatisasi BUMN.

Sejalan dengan lingkup tugas tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara (APBN), Komisi XI DPR RI telah membentuk Panitia Kerja Penerimaan yang bertujuan untuk melakukan optimalisasi Penerimaan Negara.

Sebagai Komisi yang menangani keuangan dan perbankan, dalam kesempatan pertemuan hari ini tentunya Komisi XI DPR RI ingin melihat laporan kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean (TMP) Tanjung Perak, sehingga apabila terdapat masalah-masalah dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat kami tindak lanjuti dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, target penerimaan Cukai ditetapkan sebesar Rp146,4 triliun, Bea Masuk sebesar Rp37,2 triliun dan Bea Keluar sebesar Rp2,8 triliun, sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp186,5 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan sampai dengan saat ini berdasarkan data statistik kepabeanan yang dipublikasikan di situs Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencapai Rp107,2 triliun atau 57,48% dari target yang telah ditetapkan, yang terdiri dari penerimaan Cukai mencapai Rp27,8 triliun atau 19,03%, Bea Masuk mencapai Rp13,4 triliun atau 36,08%, Bea Keluar mencapai Rp753,5 miliar atau 26,14% dan PDRI Rp65,1 triliun.

Dalam kesempatan kunjungan langsung ke KPPBC Tipe Madya Pabean (TMP) Tanjung Perak pada hari ini, Komisi XI DPR RI ingin mendapatkan masukan terkait dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN 2016. Komisi XI DPR RI berharap dalam pertemuan hari ini dapat disampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Pabean (TMP) Tanjung Perak dalam mencapai target yang sudah ditetapkan di tahun 2016.

Susunan keanggotaan tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Penerimaan Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

No.	No. Angg	Nama Anggota	Fraksi	Keterangan
1.	183	M. Prakosa	F. PDIP	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi XI
2.	465	Ir. H. Achmad Hafisz Tohir	F. PAN	Wakil Ketua Komisi XI
3.	195	Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM	F. PDIP	Anggota
4.	189	Indah Kurnia	F. PDIP	Anggota
5.	196	Dra. Eva Kusuma Sundari, MA, MDE	F. PDIP	Anggota
6.	254	Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita	F. PG	Anggota
7.	350	Dr. Ir. H. Kardaya Wardika, D.E.A.	P. Gerindra	Anggota

8.	346	Heri Gunawan, SE.	P. Gerindra	Anggota
9.	429	Evi Zainal Abidin B. Comm	F. PD	Anggota
10.	463	H. Jon Erizal, SE., MBA	P. PAN	Anggota
11.	74	Dr. Hj. Anna Mu'awanah	F. PKB	Anggota
12.	68	Hadi Zainal Abidin	F. PKB	Anggota
13.	100	H. Ecky Awal Mucharam	F. PKS	Anggota
14.	541	H.M. Amir Uskara, M. Kes	F. PPP	Anggota
15.	11	H. Ahmad Sahroni, SE	F. Nasdem	Anggota

## II. INFORMASI DAN TEMUAN

### DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR

1. Target dan realisasi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai di Provinsi Jawa Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir :

**Laporan Kinerja Penerimaan Bea dan Cukai  
Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I dan Jawa Timur II  
(Periode tahun 2014 sampai dengan 2016)**

Tahun	Bea Masuk			Bea Keluar			Cukai		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2014	4.407.566,34	4.237.579,04	96,14%	684.702,63	416.476,95	60,83%	63.335.320,70	64.179.463,64	101,33%
2015	4.884.224,67	4.124.585,36	84,45%	108.313,96	92.969,07	76,60%	79.005.499,50	79.164.972,04	100,20%
2016	4.723.583,83	2.130.116,85	45,10%	47.393,00	17.849,71	37,66%	78.983.555,73	16.662.798,69	21,10%

\*) sampai dengan Juni 2016

Realisasi Bea Masuk pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -2,67% dibandingkan realisasi pada tahun 2014. Sedangkan realisasi cukai pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 23,35% dibandingkan realisasi pada tahun 2014 (Cukai pada Januari hingga Februari 2016 ditarik pada bulan Desember 2015). Dan Bea Keluar pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 80,08% dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2014.

2. Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan bea dan cukai di Provinsi Jawa Timur:

- Meningkatkan pengawasan *surveylance* dan analisa intelijen atas pemberitahuan impor agar dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.

- Melakukan penelitian dokumen secara seksama atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- Meningkatkan patroli darat dan laut untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal dan mencegah masuknya barang-barang yang dilarang.
- Meningkatkan pengawasan dan penindakan atas peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.
- Optimalisasi penagihan terhadap piutang bea cukai yang belum dilakukan penagihan atau masih menjadi piutang tidak lancar.

3. Pola kerja dan upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Bea dan Cukai di Provinsi Jawa Timur :

a. Optimalisasi penerimaan

- Melakukan penyuluhan terkait kepatuhan kepada seluruh pengguna jasa pada sektor cukai, impor, dan ekspor.
- Melakukan pengawasan secara efektif dan efisien terhadap sektor-sektor yang mempengaruhi penerimaan.

b. Pencegahan dan penyelundupan :

- Meningkatkan patroli darat dan laut untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal dan masuknya barang-barang yang dilarang.
- Meningkatkan kemampuan analisa intelijen.

c. Tindakan terhadap penyelundup dan barang hasil selundupan :

- Menetapkan sanksi administrasi dan sanksi pidana
- Terhadap barang ditetapkan menjadi Barang Dikuasai Negara dan selanjutnya ditetapkan menjadi Barang Milik Negara yang peruntukannya ditentukan oleh Menteri Keuangan.

4. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya memperlancar dan meningkatkan penerimaan bea dan cukai Provinsi Jawa Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir:

- Penurunan Tarif Bea Masuk secara umum
- Penerapan tarif dalam kerangka kerjasama FTA (*Free Trade Agreement*)
- Perubahan kebijakan di bidang impor
- Perubahan regulasi ekspor hasil tambang / mineral

- Turunnya harga *Crude Palm Oil* dunia dan pengenaan Pajak Rokok Daerah
5. Kinerja pengawasan barang kena cukai (*preventif* dan *represif*) yang telah dilakukan oleh Kanwil Bea dan Cukai Provinsi Jawa Timur:
- a. Pengawasan *Preventif*:
    - Peningkatan sistem pengawasan kepabeanan dan cukai berdasarkan pada manajemen resiko melalui kegiatan profiling terhadap pengusaha.
    - Peningkatan pembinaan dan sosialisasi pemenuhan ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai.
    - Optimalisasi pelayanan cukai dengan memanfaatkan teknologi informasi (Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi).
    - Melakukan visiting/uji eksistensi dan kepatuhan terhadap pengusaha kepabeanan dan cukai.
    - Peningkatan operasi intelijen.
  - b. Pengawasan *Represif*:
    - Penindakan terhadap kegiatan kepabeanan cukai ilegal di daerah produsen, jalur distribusi, dan peredaran/pasaran.
    - Melakukan patroli darat.
    - Melakukan penindakan Barang Kena Cukai dan barang ekspor serta impor ilegal.
  - c. Pengawasan dan pembinaan terhadap Aparat Bea dan Cukai Provinsi Jawa Timur agar tidak terjadi kebocoran Penerimaan Negara:
    - Pembentukan dan pelatihan karakter (*Capacity Building*) dan pembinaan mental secara rutin.
    - Penunjukan dan pembentukan *Agent of Change*.
    - Penerapan Reward and Punishment.
    - Penguatan fungsi Unit Kerja Kepatuhan Internal (UKKI)
    - Mengoptimalkan saluran pengaduan masyarakat.
    - Penguatan *Standard Operation Procedure* (SOP) untuk diajukan sebagai SOP yang digunakan secara nasional.
    - Melakukan ecaluasi kinerja secara berkala dan mengadakan *survey* kepuasan pelanggan.

### **III. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh didalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI.

**Jakarta, Juni 2016**

**Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI**

**Ketua**

**Ir. Muhammad Prakosa**  
**A-183**